



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV TA. 2024

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan IV Tahun 2024 dapat terlaksana.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada bagian monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah secara tepat waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Disamping itu Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

Dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan kiranya dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Putussibau, 24 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199802 1 008

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Diagram.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.....	3
D. Format Laporan Kinerja	3
E. Penyampaian Laporan Kinerja	4
F. Pengukuran Kinerja.....	4
G. Indikator Kinerja	4
H. Indikator Kinerja Utama	4
I. Pengumpulan Data Kinerja	5
J. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
B. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja	10
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran Dan Rekomendasi	39

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu	8
Tabel 2 Skala Pengukuran Ordinal.....	10
Tabel 3 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis	13
Tabel 4 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program.....	14
Tabel 5 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan.....	23
Tabel 6 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan	27

Daftar Diagram

Diagram 1 Realisasi berdasarkan Program.....	40
Diagram 2 Realisasi berdasarkan Kegiatan.....	41
Diagram 3 Realisasi berdasarkan Sub Kegiatan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan dan administrator di bidang perencanaan. Dokumen- dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu merupakan rangkaian dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, antara lain dilakukan melalui kegiatan atau pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit kerja/ bidang. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel serta transparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai

oleh APBD Kapuas Hulu yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memfokuskan pada efisiensi, efektifitas dan dampak yang dirasakan (impact).

Pelaksanaan monitoring menghasilkan informasi tentang kondisi riil pembangunan di masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tentang program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Sehingga program dan kegiatan pembangunan kedepannya sudah sesuai dengan dokumen perencanaan dan kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu.

B. TUJUAN DAN SASARAN UMUM

Pelaksanaan monitoring bertujuan untuk :

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan dan telah dilakukan;
3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Sedangkan sasaran dari monitoring adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara berkelanjutan mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- 2) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu

Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- 3) Memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat dicapai pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien;
- 4) Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

C. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

E. PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

F. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

G. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja

yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

I. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

J. SISTEMATIKA LAPORAN

1. BAB I PENDAHULUAN;
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA;
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;
4. BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan menggunakan alat berupa indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau belum.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah dicapai selama periode pembangunan.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan

berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala Bappeda untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, dan telah dilakukan revisi berdasarkan assistensi MenPAN RB,

yang mana pada tahun 2024 ini ada 4 (empat) Sasaran Strategis dan ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu tersebut dapat dilihat pada table 1 dibawah ini.

Tabel 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	Baik
2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	Persen	75,2
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	Predikat	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam sistem akuntabilitas kinerja BAPPEDA, karena merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitasnya. Pengukuran kinerja bappeda tahun 2024 dilakukan atas capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja tahun 2024.

A. Capaian Kinerja

Pada pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \text{REALISASI} / \text{RENCANA} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{INDIKATOR KINERJA} = \text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA} / \text{RENCANA}) \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing – masing, dilakukan dengan membuat capaian rata – rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel 2 (dua) dibawah ini :

Tabel 2

SKALA PENGUKURAN ORDINAL

PERSENTASE	PREDIKAT
< 100%	Tidak tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai target
> 100%	Melebihi target

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis BAPPEDA sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) dibawah ini :

Tabel 3
Realisasi anggaran dan capaian kinerja **SASARAN STRATEGIS** BAPPEDA sampai dengan Triwulan IV Tahun2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.412.460.000	1.402.834.230	99,32%	Indeks Kualitas Perencanaan	Predikat	Baik	Baik	Baik
2.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	1.728.485.000	1.722.508.550	99,65%	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RPJMD	Persen	75,2	75,2	100
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	225.050.000	224.292.500	99,66%	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
4.	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.543.065.924	6.458.533.877	98,71%	Predikat SAKIP Bappeda	Predikat	A	dinilai thn brktnya	dinilai thn brktnya
	JUMLAH	9.909.060.924	9.808.169.157	98,98%					

Dari tabel 3 (tiga) di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **9.808.169.157** atau **98,98 %** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.909.060.924**. Selanjutnya untuk capaian indikator kinerja **sasaran strategis** meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 pada indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan sudah mencapai **100 %**.

Untuk sasaran strategis lainnya seperti meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD mencapai **100 %**, meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti sudah mencapai **100 %**, sedangkan sasaran strategis meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja PREDIKAT SAKIP BAPPEDA baru bisa dinilai tahun berikutnya yaitu pada awal tahun 2025.

B. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program BAPPEDA sampai dengan Triwulan Iv Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4 (empat) dibawah ini :

Tabel 4

Realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran Program BAPPEDA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.412.460.000	1.402.834.230	99,32 %	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persen	100	100	100
					Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persen	100	100	100
					Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	Persen	75,2	75,2	100
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.728.485.000	1.722.508.550	99,65 %	1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	Persen	100	100	100

					1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	Persen	100	100	100
					1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Persen	100	100	100
					2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD	Persen	100	100	100
					2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	100	100

					2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Persen	100	100	100
					3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
					3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Persen	100	100	100
					3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100

					dengan RKPD				
					4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	75,2	75,2	100
					4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Persen	75,2	75,2	100
					4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	75,2	75,2	100

3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	225.050.000	224.292.500	99,66 %	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Persen	100	100	100
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.543.065.924	6.458.533.877	98,71 %	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	83	Akan dinilai thn brktnya	Akan dinilai thn brktnya
					Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	IPKPD	99,01	98,00	99
					Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	Persen	100	100	100
					Persentase pemenuhan data kepegawaian	Persen	100	99,78	100
					Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	87	87	100

					Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persen	100	100	100
					Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persen	100	100	100
	JUMLAH	9.909.060.924	9.808.169.157	98,98 %			2.170	2.086	96,12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **9.808.169.157** atau **98,98%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.909.060.924,-**. Sedangkan realisasi kinerja program terealisasi sebesar **2.086 dokumen/laporan dari 2.170 target dokumen/laporan** yang telah ditetapkan atau sebesar **96,12 %**, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.412.460.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.402.834.230 atau **99,32%**, sedangkan realisasi Indikator kinerja program Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD terealisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100, serta Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD terealisasi sebesar 100 % atau dengan capaian 100%.
- 2) Anggaran Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 1.728.485.000 terealisasi sebesar Rp. 11.722.508.550 atau sebesar **99,65 %** Sedangkan realisasi kinerja program antara lain indikator kinerja : 1a) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD dengan capaian 100%; 1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD dengan capaian 100%; 2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD dengan capaian 100%; 2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD dengan capaian 100%; 2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD dengan capaian 100%, 3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD

dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 100%; 3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD dengan capaian 100%; 3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD dengan capaian 100%; 4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian 100%; 4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan capaian 100%; 4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan capaian sebesar 100%.

- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan pagu sebesar Rp. 225.050.000 terealisasi sebesar Rp. 224.292.500 atau 99,66% dengan indikator kinerja Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan tercapai sebesar 100%.
- 4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan pagu Rp. 6.543.065.924 terealisasi sebesar Rp. 6.458.533.877 atau 98,71% indikator kinerja Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah sebesar 99%, Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD 100%, Persentase pemenuhan data kepegawaian 100%, Indeks Kepuasan Pelayanan Internal 100%, Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah 100%, Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik 100%, sementara untuk indikator nilai SAKIP BAPPEDA di peroleh hasil penilaian oleh APIP Kabupaten/Inspektorat pada Triwulan ke IV.

C. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Realisasi anggaran dan capaian kinerja Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5 (lima) dibawah ini :

Tabel 5 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp1.180.681.000	Rp1.172.864.230	99,34 %	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.791	100
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp84.218.000	84.218.000	100%	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp85.761.000	Rp85.752.000	99,99%	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	28	28	100
4	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rp61.800.000	Rp60.000.000	97,09%	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100

5	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp572.225.000	Rp568.969.550	99,43%	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	14	100
6	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp454.260.000	Rp452.870.500	99,69 %	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	14	14	100
7	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp702.000.000	Rp700.668.500	99,81 %	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	14	100
8	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp104.500.000	Rp104.436.000	99,94 %	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	1	100
9	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp120.550.000	Rp119.856.500	99,42 %	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembang an Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	1	100

10	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp130.885.800	130.145.900	99,43 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100
11	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.109.415.000	4.040.704.683	98,33 %	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	574	100
12	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.347.500	28.877.200	98,40 %	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
13	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.688.500	94.240.250	98,49 %	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100
14	Kegiatan : Administrasi Umum	904.759.500	904.088.000	99,93 %	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	8	8	100
15	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.960.874	946.372.009	98,89 %	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100

16	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.008.750	314.105.835	99,40 %	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	3	100
	JUMLAH	9.909.060.924	9.808.169.157	99%			3.822	3.822	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **9.808.169.157** atau **99%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.909.060.924,-**.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar 3.822 dari 3.822 Dokumen yang ditargetkan atau sebesar 100%.

D. REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN

Realisasi Anggaran dan capaian kinerja sasaran Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6
Realisasi anggaran dan capaian kinerja Sub Kegiatan BAPPEDA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
			Rp	%				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	580.182.000	577.518.430	100%	Dokumen	2	2	100
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	149.656.000	149.138.500	100%	Laporan	2	2	100
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	28.595.000	28.595.000	100%	Laporan	2	2	100
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	28.670.000	28.670.000	100%	Laporan	2	2	100
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.760.000	70.240.000	98%	Laporan	2	2	100
6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100.826.000	97.990.500	97%	Laporan	2780	2.780	100
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	220.992.000	220.711.800	100%	Laporan	1	1	100

8	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	39.570.000	39.570.000	100%	Laporan	1	1	100
9	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	44.648.000	44.648.000	100%	Laporan	332	332	100
10	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	35.856.000	35.856.000	100%	Laporan	1	1	100
11	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.905.000	49.896.000	100%	Laporan	27	27	100
12	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	61.800.000	60.000.000	97%	Dokumen	1	1	100
13	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.969.000	103.900.000	100%	Dokumen	1	1	100
14	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4.400.000	4.371.000	99%	Dokumen	1	1	100

15	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.801.000	53.714.000	100%	Dokumen	4	4	100
16	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	110.594.000	108.188.500	98%	Laporan	1	1	100
17	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	93.265.000	92.656.200	99%	Dokumen	1	1	100
18	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.576.000	7.565.400	100%	Dokumen	1	1	100
19	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39.229.000	39.212.950	100%	Dokumen	4	4	100
20	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	159.391.000	159.361.500	100%	Laporan	1	1	100

21	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.203.000	59.757.000	99%	Dokumen	1	1	100
22	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	13.519.000	13.327.000	99%	Dokumen	1	1	100
23	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.000.000	51.912.000	100%	Dokumen	4	4	100
24	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	85.660.000	85.287.500	100%	Laporan	1	1	100
25	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77.128.000	77.057.000	100%	Dokumen	1	1	100
26	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.050.000	8.992.000	99%	Dokumen	1	1	100

27	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	53.400.000	53.400.000	100%	Dokumen	4	4	100
28	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	103.300.000	103.138.000	100%	Laporan	1	1	100
29	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.518.000	117.280.800	100%	Dokumen	1	1	100
30	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.919.000	6.919.000	100%	Dokumen	1	1	100
31	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.747.000	47.712.500	100%	Dokumen	4	4	100
32	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	178.813.000	178.616.100	100%	Laporan	1	1	100

33	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	117.751.000	117.257.500	100%	Dokumen	1	1	100
34	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.201.000	7.201.000	100%	Dokumen	1	1	100
35	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42.697.000	42.581.100	100%	Dokumen	4	4	100
36	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	183.354.000	183.100.500	100%	Laporan	1	1	100
37	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	104.500.000	104.436.000	100%	Laporan	1	1	100
38	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	120.550.000	119.856.500	99%	Laporan	1	1	100
39	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.872.300,00	16.665.850	99%	Dokumen	4	4	100

40	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.094.000,00	9.058.800	100%	Dokumen	2	2	100
41	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.844.000,00	7.821.500	100%	Dokumen	2	2	100
42	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.450.000,00	14.429.750	100%	Dokumen	2	2	100
43	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.992.000,00	9.975.250	100%	Dokumen	2	2	100
44	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.348.000,00	11.266.750	99%	Laporan	3	3	100
45	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.285.500,00	60.928.000	99%	Laporan	7	7	100
46	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.820.689.000	3.753.178.683	98%	Orang/bulan	532	532	100
47	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	237.675.000	236.475.000	99%	Dokumen	9	9	100
48	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.939.000	14.939.000	100%	Dokumen	14	14	100
49	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.224.000,00	9.224.000	100%	Dokumen	1	1	100
50	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.779.000,00	11.779.000	100%	Dokumen	1	1	100

51	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.109.000	15.109.000	100%	Dokumen	17	17	100
52	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.722.500	4.662.000	99%	Unit	1	1	100
53	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000	3.947.050	99%	Dokumen	1	1	100
54	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.222.500	5.210.200	100%	Laporan	1	1	100
55	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.822.500	4.793.400	99%	Laporan	1	1	100
56	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.040.000	4.756.050	94%	Laporan	2	2	100
57	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.540.000	5.508.500	99%	Laporan	1	1	100
58	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.242.500	5.150.500	98%	Unit	1	1	100
59	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48.680.000	47.540.000	98%	Paket	1	1	100
60	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.400.000	5.363.750	99%	Dokumen	1	1	100

61	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.100.000	3.085.500	100%	Dokumen	1	1	100
62	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.400.000	12.238.500	99%	Dokumen	4	4	100
63	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.866.000	20.862.000	100%	Orang	1	1	100
64	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.335.000	17.335.000	100%	Paket	1	1	100
65	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	100%	Paket	1	1	100
66	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.040.000	111.040.000	100%	Paket	1	1	100
67	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.681.000	57.681.000	100%	Paket	1	1	100
68	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	17.686.500	17.686.500	100%	Paket	1	1	100
69	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612.417.000	611.806.000	100%	Laporan	1	1	100
70	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.000.000	12.979.500	100%	Dokumen	1	1	100

71	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.600.000	25.560.000	100%	Dokumen	1	1	100
----	---	------------	------------	------	---------	---	---	-----

72	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.164.838	100.950.214	92%	Laporan	1	1	100
73	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	847.796.036	845.421.795	100%	Laporan	1	1	100
74	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.928.750	182.287.100	99%	Unit	1	1	100
75	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.080.000	32.080.000	100%	Unit	1	1	100
76	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100%	Unit	1	1	100
	JUMLAH	9.909.060.924	9.808.169.157	99%		3.822	3.822	100

Dari tabel 6 (enam) di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar Rp **9.808.169.157** atau **99%** dari pagu anggaran sebesar Rp. **9.909.060.924**. Berikutnya untuk **capaian indikator kinerja Sub kegiatan** sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dimana dari **3.822** Dokumen/Laporan yang ditargetkan sudah tercapai sebanyak **3.822** Dokumen/Laporan atau sudah mencapai **100%**.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang telah dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 9.808.169.157** atau **99%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 9.909.060.924** dengan rata-rata capaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Rata – rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis **99, 99%**
- 2) Rata - rata capaian indikator kinerja Program **96,12%**;
- 3) Rata - rata capaian indikator kinerja Kegiatan **100 %**;
- 4) Rata - rata capaian indikator kinerja Sub Kegiatan **100 %**.

B. SARAN

Saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja pada Tahun beikutnya antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan percepatan pencapaian target kinerja terutama untuk percepatan pencapaian kinerja Sasaran Strategis dan capaian target kinerja Program ;
- 2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Eksternal terhadap Orgaisasi Perangkat Daerah sesuai rencana aksi;
- 3) Mempercepat pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target kinerja pada rencana aksi.

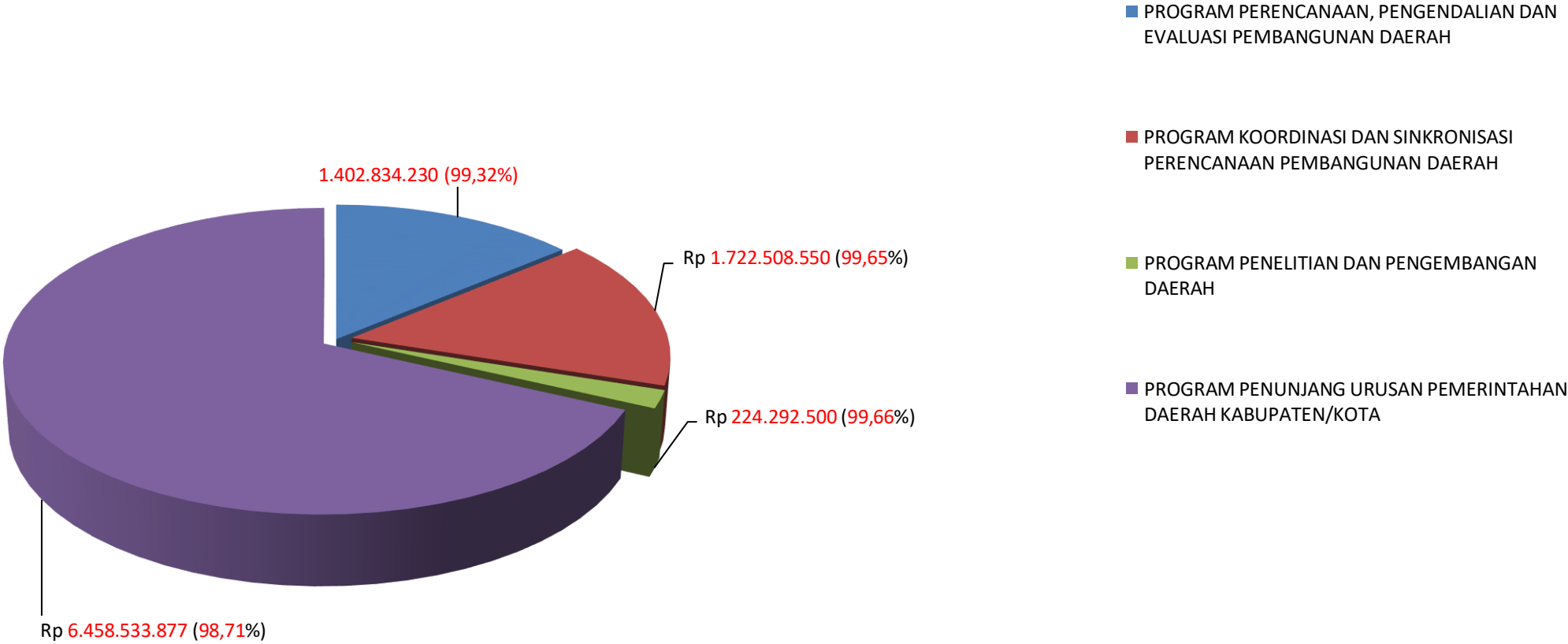
Putussibau, 24 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

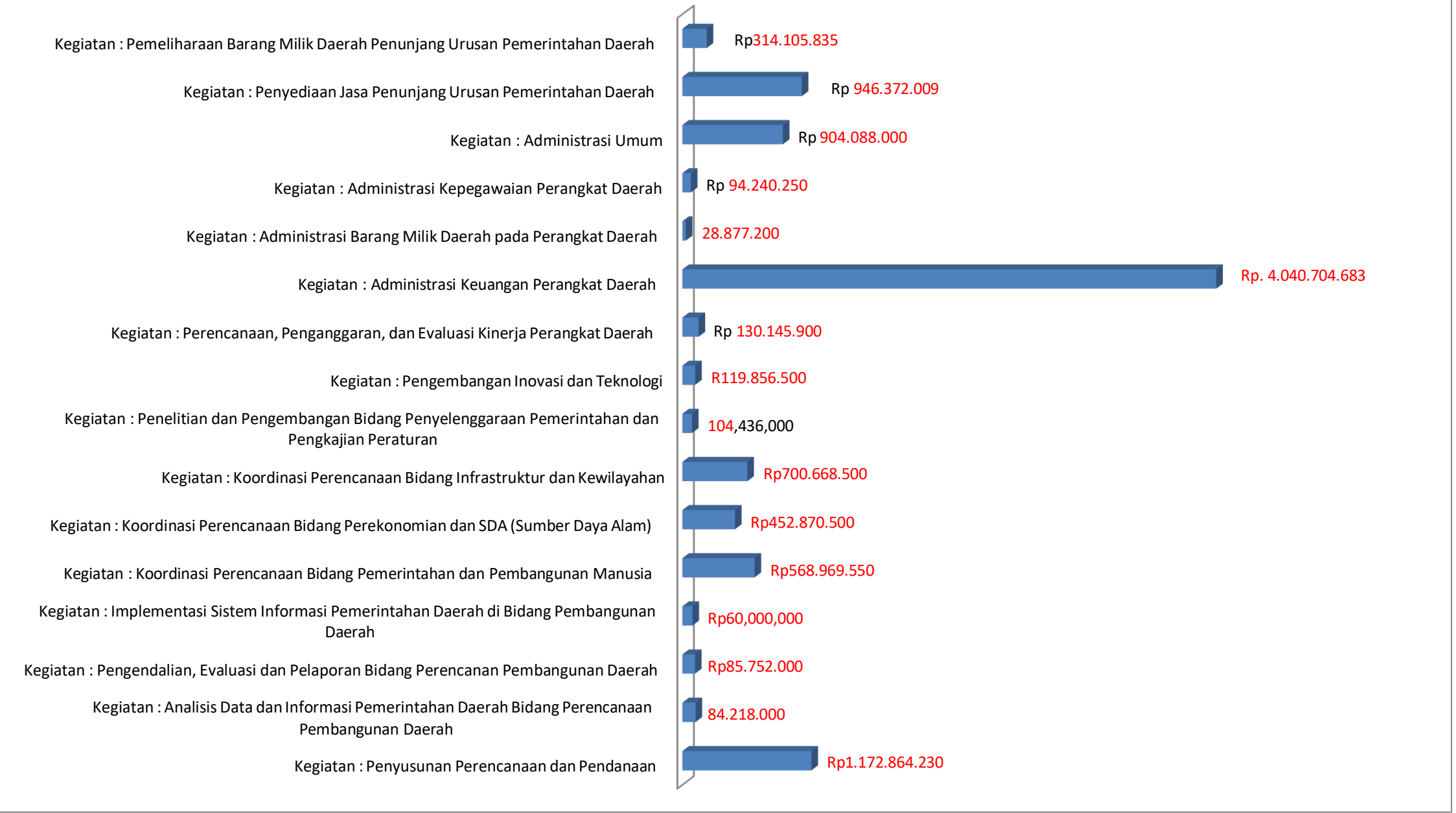


Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199802 1 008

REALISASI BERDASARKAN PROGRAM



Realisasi Berdasarkan Kegiatan



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fransiskus Diaan
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan

Putussibau, 25 November 2024

Pihak pertama,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada RPJMD	75,2 %
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100 %
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.543.065.924	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.412.460.000	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.728.485.000	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan	225.050.000	APBD
JUMLAH		9.249.461.682	

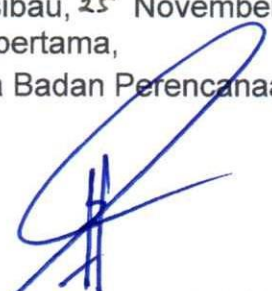
Pihak Kedua,
Bupati Kapuas Hulu,



Fransiskus Diaan

Putussibau, 25 November 2024

Pihak pertama,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

**SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy, S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA
Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, November 2024

Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA

Dedy, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750506 200401 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

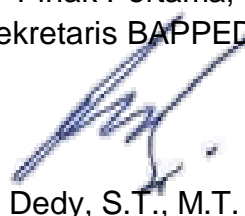
No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	Meningkatnya manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BAPPEDA	1. Nilai SAKIP BAPPEDA 2. Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD 4. Persentase pemenuhan data kepegawaian 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal 6. Persentase pemenuhan standar kebutuhan Barang Milik Daerah 7. Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah 8. Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	1. 83 2. 99,01 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 87 6. 100 % 7. 100 % 8. 100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.543.065.924
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.885.800
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.109.415.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.347.500
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.688.500
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	904.759.500
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	956.960.874
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.008.750
	Jumlah	6.543.065.924


Pihak Kedua
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, November 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris BAPPEDA


Dedy, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19750506 200401 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriadi Syafa'ad, S.Kom., M.A.P.
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2024



Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008


Pihak pertama,
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Eka Fitriadi Syafa'ad, S.Kom, S.Kom., M.A.P.
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, patisipatif dan aplikatif	1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD; 2. Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	1. 100 % 2. 100 %
2	Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	75,2 %
3	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.412.460.000
1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.180.681.000
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.218.000
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85.761.000
1.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	61.800.000
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	225.050.000
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	104.500.000
2.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	120.550.000
	Jumlah	1.637.510.000




Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA

Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, November 2024

Pihak pertama,
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian
dan Pengembangan



Eka Fitriadi Syafa'ad, S.Kom., M.A.P._
Penata Tk.I
NIP. 198307122011011004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, November 2024

Pihak Kedua,

Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan
Budaya BAPPEDA

Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata
NIP. 19900923 201402 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	<div>1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;</div> <div>2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD;</div> <div>3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;</div> <div>4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</div>	<div>1. 100 %</div> <div>2. 100 %</div> <div>3. 100 %</div> <div>4. 75,2 %</div>

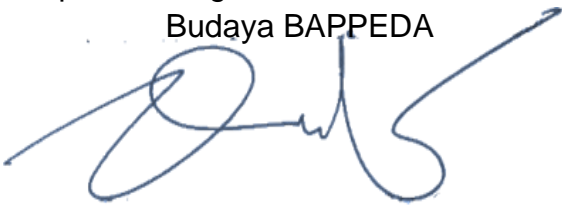
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.728.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	572.225.000
	Jumlah	572.225.000

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, November 2024
Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA



Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
Penata
NIP. 19900923 201402 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : C.Jimmy.J., SP.,M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

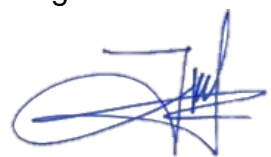
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, November 2024
Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian



C. Jimmy.J.,SP.,M.Eng.
Pembina
NIP. 197607302005021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	<div>1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD;</div> <div>2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RKPD;</div> <div>3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</div> <div>4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</div>	<div>1. 100 %</div> <div>2. 100 %</div> <div>3. 100 %</div> <div>4. 75,2 %</div>

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.728.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	454.260.000
	Jumlah	454.260.000

Putussibau, November 2024

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan
Perekonomian



C. Jimmy.J.,SP.,M.Eng_
Pembina
NIP. 197607302005021001

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si_
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Darmanta, S.T.,M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, dan
Pengembangan Wilayah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

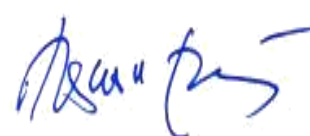
Putussibau, November 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah



Agus Darmanta, S.T.,M.T.,
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA, DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan perangkat daerah yang berkualitas	<div>1. Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD;</div> <div>2. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD;</div> <div>3. Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;</div> <div>4. Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</div>	<div>1. 100 %</div> <div>2. 100 %</div> <div>3. 100 %</div> <div>4. 75,2 %</div>

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.728.485.000
1.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	702.000.000
	Jumlah	702.000.000

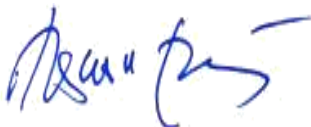
Putussibau, November 2024

Pihak Kedua,
Kepala BAPPEDA



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008

Pihak pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah



Agus Darmanta, S.T.,M.T.,
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
SEKRETARIAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP BAPPEDA	A	-	-	-	-	-	-	Belum terealisasi /tercapai, karena akan dinilai pada tahun berikutnya	Masih Menunggu penilaian AKIP dari Inspektorat Kabupaten

KURKIN TRIWULAN IV TAHUN 2024 (SEKRETARIAT)

NO	PROGRAM/KEGIATA /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	83	-	Belum terealisasi /tercapai, karena akan dinilai pada tahun berikutnya	Masih Menunggu penilaian AKIP dari Inspektorat Kabupaten
		Tingkat realisasi penyerapan keuangan Perangkat Daerah	IPKPD	99,01	98	99	
		Persentase kesesuaian Hasil Rekonsiliasi BMD	Persen	100	100	100	
		Persentase pemenuhan data kepegawaian	Persen	100	99,78	100	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Persen	87	87	100	
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Persen	100	100	100	
		Persentase BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persen	100	100	100	
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100	
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3	3	100	

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
7	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	7	100	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	574	574	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	532	342	100	
2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	9	9	100	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	14	14	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100	
6	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	17	17	100	
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100	
1	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100	

4	Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	
6	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	100	
1	Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	100	
6	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	100	
5	Kegiatan : Administrasi Umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum	Dokumen	8	8	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	
4	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100	

6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100	
7	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100	

8	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100	
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	2	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	3	100	
1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	
	JUMLAH			625	625	100	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Desember 2024
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Dedy, S.T.,M.T
NIP. 19750506 200401 001

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	-	-	-	-	Baik	Baik		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	75,2	4,73	5,93	39,44	25,1	50,10	75,2		
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Rencana penelitian dan pengembangan	100	0	0	0	0	100	100		

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024 BIDANG BIDANG PENGENDALIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD	Persentase	100	100	100	
		Persentase ketersediaan elemen data dan informasi pemerintahan daerah	Persentase	100	100	100	
		Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RKPD	Laporan	75,2	75,2	100	
1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	2.791	2.791	100	
1	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	100	
2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	2	100	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	2	2	100	
5	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100	
6	Sub Kegiatan : Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2.780	2.780	100	
7	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1	1	100	
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	333	333	100	

1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	332	332	100	
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	28	28	100	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	27	27	100	
4	Kegiatan : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	
1	Sub Kegiatan : Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100	
NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang direkomendasikan untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Persen	100%	100%	100%	
5	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	1	1	100	
1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	100	
6	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pemanfaatan hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	1	100	


1	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	100	
	JUMLAH			3.155	3.147	100	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P
NIP. 19830712 201101 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	-	-	-	Baik	Baik	Baik		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	75,2	-	-	-		75,2	75,2		

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN FISIK, PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1c) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD	Laporan	100	100	100	
		2c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100	100	100	
		3c) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RKPD	Laporan	100	100	100	
		4c) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	75,2	75,2	100	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	14	14	100	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan	1	1	100	

6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	4	4	100	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100	
JUMLAH				14	14	100	



Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Agus Darmanta, S.T.,M.T
NIP. 19700809 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024
PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				TW I	TW II	TW III	TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= 5+6+7+8	(10)=(9/4*100)%	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	-	-	-	Baik	Baik	Baik		
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah	Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada RPJMD	75,2	-	-	39,44	35,76	75,2	100		

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1a) Presentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD;	Laporan	100	100	100	
		2a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RKPD;	Laporan	100	100	100	
		3a) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	Laporan	100	100	100	
		4a) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Laporan	75,2	39,4	52	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	14	14	100	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	100	

4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	1	100	
---	---	--	---------	---	---	-----	--

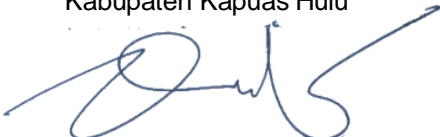
5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	100	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100	
	JUMLAH			14	14	100	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP. 19900923 201402 1 003

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

[illegible]

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100%	8
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1b) Persentase keselarasan muatan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RPJMD	Laporan	100	100	100	
		2b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Laporan	100	100	100	
		3b) Persentase keselarasan muatan RENJA OPD dengan RENSTRA OPD Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam dengan RKPD	Laporan	100	100	100	
		4b) Persentase Pencapaian Indikator Kinerja perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam	Laporan	75,2	75,2	100	
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	14	14	100	
1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	
2	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100	
3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	100	
4	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100	


5	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	100	
6	Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1	0	100	
7	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	4	100	
8	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	100	
JUMLAH				14	9	100	

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si.
NIP. 19730102 199803 1 008

Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP. 19760730 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN IV T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Dedy, S.T., M.T.
NIP : 19750506 200401 1 001
Jabatan : Sekretaris BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **Rp.6.543.065.924,-** (*Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Anggaran tersebut untuk membiayai 1 (Satu) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan .

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran belanja daerah sampai dengan Triwulan IV 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. **Rp.6.458.533.877,-** (*Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) atau **98,71%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai Triwulan IV Tahun 2024 pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **100 %**. Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya

tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan.

Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Dedy, S.T., M.T.
NIP. 19750506 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id
Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN IV T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama

: Ambrosius Sadau, S.H., M.Si

NIP

19730102 199803 1 008

Jabatan

: Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama

: Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P.

NIP

19830712 201101 1 004

Jabatan

: Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **Rp1.637.510.000,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*). Anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH sebesar **Rp1.412.460.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu rupiah*) dan untuk membiayai PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH sebesar **Rp225.050.000,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp. **Rp1.616.305.730,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah*) atau sebesar **98,71%** dari pagu sebesar **Rp.1.637.510.000,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*). Untuk **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** terealisasi sebesar **Rp1.392.013.230** atau sebesar **98,55%**, sedangkan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah terealisasi sebesar **Rp224.292.500,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau **99,66%** dari pagu sebesar **Rp225.050.000,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).

III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan IV Tahun 2024 pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 0% sudah tercapai sebesar **100%**. Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kapuas Hulu



Eka Fitriadie Syafaat, S.Kom., M.A.P
NIP. 19830712 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN IV T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

- Nama** : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si

NIP : 19730102 199803 1 008

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
- Nama** : Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.

NIP : 19900923 201402 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Telah dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **572.225.000,-** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan* : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Program PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH sampai dengan Triwulan IV T.A. 2024 adalah sebesar Rp. **568.969.550,-** (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau **99,43%**.

III. PENCAPAIAN KINERJA


Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan IV Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar **100 %**.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada, karena semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

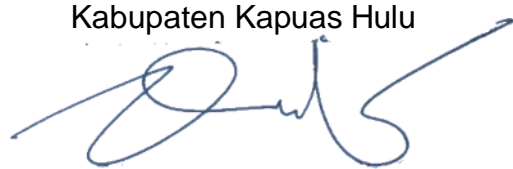
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Kabupaten Kapuas Hulu



Kristoforus Orlando, S.IP., M.Si.
NIP. 19830712 201101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN IV T.A 2024**

Pada Hari ini Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu

2. Nama : C.Jimmy.J.SP.,M.Eng.
NIP 197607302005021001
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Telah dilakukan pengukuran kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **454.260.000,-** (*Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) Anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan* : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah sampai dengan Triwulan IV T.A. 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan nama PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan* : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam) adalah sebesar Rp. **452.870.500,-** (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau **99,69%**.

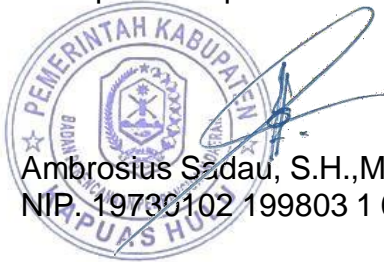
III. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian Kinerja atau Kinerja Fisik Kegiatan sampai triwulan IV Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar **100%**.

Untuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada prinsipnya tidak ada. Semua proses berjalan berdasarkan Rencana Aksi yang telah di rumuskan. Adapun rencana aksi tersebut dapat dilihat pada link dengan alamat <https://s.id/29ain>.

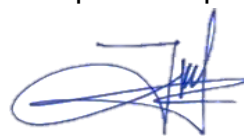
Demikian Berita Acara ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

bKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
Kabupaten Kapuas Hulu



C.Jimmy.J.SP., M.Eng.
NIP. 197607302005021001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE
TRIWULAN IV T.A 2024

Pada Hari ini Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di ruang rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
NIP 19730102 199803 1 008
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu
2. Nama : Agus Darmanta, S.T.,M.T.
NIP 19700809 200003 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Fispra dan Pengembangan Wilayah

Telah dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap realisasi pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV T.A. 2024) dengan hasil sebagai berikut :

I. ALOKASI APBD TAHUN 2024

Alokasi APBD Tahun 2024 pada Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. **702.000.000,-** (*Tujuh Ratus Dua Juta Rupiah*), anggaran tersebut untuk membiayai PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*).

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (*Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*) sampai dengan Triwulan IV T.A. 2024 adalah sebesar **Rp. 700.668.500,-** (*Tujuh Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima RatusRupiah*) atau **99,81%**.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Ambrosius Sadau, S.H.,M.Si
NIP. 19730102 199803 1 008

Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana
dan Pengembangan Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Agus Darmanta".

Agus Darmanta, S.T.,M.T.
NIP. 19700809 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Laman bappeda.kapuashulukab.go.id

Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT

- Tanggal : 24 Januari 2025
- Pukul : 09.30 WIB – selesai
- Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA
- Acara : Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024
- Pimpinan Rapat : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peserta Rapat : 1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian;
4. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
5. Kasubbag Program;
6. JF di lingkungan BAPPEDA;
7. Staf di lingkungan BAPPEDA.

Hasil rapat :

1. Berdasarkan hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2024 atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing – masing bidang dan sekretariat di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu, dimana dari 4 (Empat) Program yang terjabarkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, capaian Kinerja **Sangat Tinggi (ST)**, yaitu sebesar **100%** dan Realisasi Anggaran mencapai **98,98%**;
2. Dalam rangka percepatan evaluasi renja untuk kedepannya diharapkan setiap Unit Kerja/Bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu segera menyampaikan Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri (Laporan Kinerja Bidang) ke Sub Bagian Program tiap akhir Triwulan;

3. Guna mempercepat evaluasi kinerja Perangkat Daerah untuk itu kedepannya diharapkan agar setiap Unit Kerja/Bidang yang ada dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas Hulu selalu tepat waktu dalam menyelenggarakan atau melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, agar menjadi bahan/catatan perbaikan padatriwulan selanjutnya.

Notulen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andreas Anjas', with a stylized flourish at the end.

Andreas Anjas, S.Ak
NIP. 19810815 200012 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
Dari : Sekretaris Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu
Tanggal : 23 Desember 2024
Nomor : 000.3.6 / **924** /BAPPEDA/SET-A
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan IV Tahun 2024

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal Triwulan IV Tahun 2024 di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, untuk perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas mohon bantuan dan kerjasama setiap Bidang/Unit Kerja di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat menyampaikan **Laporan Kinerja Bidang / Form Pengukuran Kinerja Kegiatan /Realisasi Capaian Kinerja** (contoh terlampir pada nota dinas ini).
3. Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) seperti yang disebutkan pada poin 2 (dua) di atas dapat diunduh pada web dengan alamat : <https://tally.so/r/wLb641>;

4. **Laporan Kinerja Bidang / Form Pengukuran Kinerja Kegiatan /Realisasi Capaian Kinerja** tersebut disampaikan ke Sub Bagian Program paling lambat tanggal 30 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,
Sekretaris,




Dedy, S.T., M.T.

NIP. 19750506 200401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I.Panjaitan No.22 A Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Laman bappeda.kapuashulukab.go.id, Pos-el bappeda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 20 Januari 2025

Nomor : 000.3.6 / 53 /BAPPEDA/SET-A
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Yth. (Daftar terlampir)
di-
Tempat

Dalam rangka mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu dan sebagai upaya percepatan pencapaian kinerja tahun 2024 serta dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 000.3.6/924/BAPPEDA/SET-A tanggal 23 Desember 2024 tentang permintaan pengisian Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Triwulan IV tahun 2024 maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Januari 2025
Waktu : 09:30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Bappeda
Triwulan IV tahun 2024

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,






Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730102 199803 1 008


Lampiran I Surat Nomor : 000.3.6 / 53 / BAPPEDA/SET-A
Tanggal : 20 Januari 2025
Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
4. Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian

Lampiran I Surat Nomor : 000.3.6 / 53 / BAPPEDA/SET-A
 ALUR / STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA (MONEVKIN) INTERNAL BAPPEDA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Kepala SKPD	SUBBAG PROGRAM	SEKRETARIS/KABID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SKPD Membuka acara Rapat MonevKin Internal BAPPEDA					5 Menit		
2	Subbag Program Memaparkan Kurkin / hasil MonevKin Internal BAPPEDA				Renja/Renstra, RKA/DPA, SPJ Fungsional, Kurkin, ev Renja	25 Menit	Laporan Monev	
3	Sekretaris/ Kepala Bidang menanggapi atau memberi masukan atas paparan Kurkin dai Subbag Program				Kurkin /ev renja	10 Menit		
4	Arahan dari Kepala SKPD sekaligus menutup acara Rapat Money					10 Menit		

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Kepulauan Hulu,

 Ambrosius Sadau, S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730102 199803 1 008



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor SOP	000.3.6/ /BAPPEDASSETA
Tanggal Pembuatan	20 Januari 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	21 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu 
	
	Ambrosius Padau, S.H., M.Si NIP. 19730102 199803 1 008
Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
3. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung kelancaran evaluasi Internal SAKIP
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala : Eselon II, b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik;
2. Sekretaris : Eselon III, b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik
3. Kabid : Eselon III, a, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik
4. Ka. Subbag Program : S1 diutamakan Ekonomi, Hukum
5. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan Akuntansi, D-3 Administrasi Perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi, Hukum

Keterkaitan:

SOP Penyusunan Rencana Kerja

SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Peringatan

Jika prosedur ini tidak dilakukan maka Penilaian SAKIP tidak bisa dilaksanakan.

Peralatan/Perlengkapan

1. Renja/Renstra
 2. RKAD/PA
 3. Laporan Keuangan
 4. Penetapan Kinerja BAPPEDA
 5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan
 6. Alat Tulis Kantor / Komputer/Laptop
- Pencatatan dan Pendataan**
- dilaporkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi (Money)



DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 24 Januari 2024
 Waktu : Pukul 09.30 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kepala BAPPEDA
 Acara : Monevkin Triwulan IV Tahun 2024

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TTD
	AMBROSIOUS SADU, S.H., M.H.	197301021990031008	Ka. Badan	1. 
2	DEDY	197505062009011001	Sekretaris	2. 
3	AGUS DARMAWITA	197008032006031005	Katib Fiqh	3. 
4.	Fransiska Ure	19790922 200604 2028	Kanbng Umum dan Aparatur	4. 
5.	Tajunn			5. 
6	Mateus	199703271999031002		6. 
7	Danu Anggoro	19930829 202421100		7. 
8.	Felix Wage	198008302006041011		8. 
9.	KRIVIANUS ANDI	19910510 2022031007		9. 
10.	Budi Septiaufri	19920924200303002	JFP	10. 

	lin Nisah	197002252009022004	Perencana Ahli Muda		11. 
	Trias Anjer Suri	19940429200902003	Staf	12. 	
	Arna Yetti	-	Staf Bappeda		13. 
	Firmansyah			14. 	
	Sri Wahyuni	19960909200202001	Analisis Peneliti		15. 
	Alam Satra	198711182005021003	Analisis Kencana Program 2 Kog	16. 	
	Mansur Zullean	-	Staf BAPPEDA		17. 
	Kristoforus Orlando	199009232004021003	Ketid Sasbud	18. 	
	Andreas Anjas	198108152000121002	Kasubkang Program		19. 
				20.	
					21.
				22.	
					23.
				24.	
					25.


Kegiatan : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kapuas Hulu Triwulan IV Tahun 2024









 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU</p>	Nomor SOP	19/SOP/BAPPEDA-KH/2024
	Tanggal Pembuatan	08 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	08 Januari 2024
	Disahkan oleh	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGISIAN PENGUKURAN KINERJA (KURKIN) & MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mendukung kelancaran evaluasi internal SAKIP 4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026	1. Kepala : Eselon II.b, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik. 2. Sekretaris : Eselon III.a, S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum, Teknik. 3. Ka. Subbag Perencanaan : S1 – S2 diutamakan Ekonomi, Hukum 4. Penyiap data : SMA, SMK diutamakan akuntansi, administrasi perkantoran, S1 diutamakan Ekonomi, Hukum Peralatan/Perlengkapan 1. Renja/Renstra 2. RKA/DPA 3. Laporan Keuangan/ SPJ Fungsional 4. Penetapan Kinerja BAPPEDA 5. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan 6. Alat Tulis Kantor / Komputer/Laptop	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka Penilaian SAKIP tidak bisa dilaksanakan.	dilaporkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu


 Andrius Sadau, S.H., M.Si
 NID. 19730102 199803 1 008

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN KINERJA (KURKIN) & MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)								
NO	KEGIATAN	PELAKSANA		KABAN/SEKBAN	MUTU BAKU			KET
		SUB BAG PROGRAM	BIDANG/SEKRETARIAT		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Subbag Program mengupload file Pengukuran Kinerja (Kurkin) melalui web SI_CANDA@Bappeda;	START			Nota Dinas	5 menit		File Pengukuran Kinerja (Kurkin) diunduh melalui web dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641
2	Masing-masing Bidang Menginput/mengisi Pengukuran Kinerja (Kurkin) melalui web SI_CANDA@Bappeda dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641		Menginput KURKIN		File Pengukuran Kinerja (Kurkin)	120 menit	Kurkin	File Pengukuran Kinerja (Kurkin) diunduh melalui web dgn alamat : https://tally.so/r/wLb641
3	Subbag Program melakukan perekapan atas kurkin yang sudah diisi oleh masing-masing bidang				Nota Dinas, Kurkin, Renja/Renstra, RKA/DPA, Laporan Keuangan, SPJ Fungsional	120 menit	Kurkin	
4	Menyampaikan Undangan Monev ke bidang dan Menyiapkan Dokumen Monitoring & Evaluasi (MONEV)	Doc monev & undangan	undangan		undangan	10 menit		
5	Melaksanakan Rapat Monitoring & Evaluasi (MONEV) Kinerja				Kurkin	30 menit		
6	Mengarsipkan dokumen hasil rapat Monitoring & Eluasi (MONEV)	END			Kurkin	10 menit	LAPORAN MONEV	


 Kabupaten Kapuas Hulu
 Kepala Dinas
 Agusrius Sadau, S.H., M.Si
 NIP. 19730102 199803 1 008